

DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL PADA SEKTOR PERTANIAN TERHADAP EKONOMI, TENAGA KERJA, DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN

(The Impact of Fiscal Policy in the Agricultural Sector on Economy, Labor and Income Distribution in Rural and Urban Area)

**M. Rizal Taufikurohman¹⁾, Rina Oktaviani²⁾,
Mangara Tambunan²⁾, dan Dedi Budiman Hakim²⁾**

ABSTRACT

The fiscal policy in the agricultural sector of food, fertilizer and seed subsidies that had been set by the government contained in Budget of the State. The main problem is the effort to respond to a variety of policy issues on agriculture subsidies that encourage changes in economic growth, the amount of labor absorption, income distribution in rural and urban areas. The study aimed to analyze the impact of fiscal policy on major issues above. CGE approach is a method of analysis used. The analysis showed that the impact of the policy to increase national economic growth in the short term due to the increase in Aggregate output is accompanied by rising volume of exports and trade balance. While in the long run, in addition to aggregate output rises, rising real investment, nominal wage sare also an average power employment and household consumption level sare increasing as well. That policy has a number of labor absorption capacity and increased real income at the house hold level in rural and urban areas for short and long term. The implications is the need to maintain the policy which improved can increase the subsidies value and optimize the implementation of infrastructure, management system, monitoring and evaluation policy. To realize the effectiveness and efficiency of the policy to labor increase, it is necessary to improve the structure of labor markets in both areas.

Key words: fiscal policy in the agriculture sector, economy growth, labor, income distribution

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada tahap awal dilakukan pembangunan, diperlukan intervensi pemerintah.

Pengeluaran pemerintah merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk membiayai fasilitas umum dan memperbaiki kinerja pelayanan, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun berupa pelayanan umum. Intervensi

¹⁾ Staf pengajar pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Bioindustri, Univ. Trilogi Jakarta

²⁾ Staf Pengajar Pascasarjana IPB

pemerintah ini diperlukan dan timbul apabila terjadi kegagalan pasar (*market failure*) dalam alokasi sumber daya. Kegagalan pasar tersebut terjadi disebabkan oleh adanya barang publik, pasar yang tidak sempurna, dan adanya eksternalitas dari kegiatan ekonomi.

Terdapat tiga hal pokok dalam pembangunan perekonomian yang menentukan peranan dan intervensi pemerintah, yakni (1) peranan alokasi, (2) peranan distribusi, dan (3) peranan stabilisasi. Tujuan pembangunan perekonomian nasional adalah untuk mencapai (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, (2) pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan (3) stabilisasi ekonomi. Bentuk intervensi pemerintah untuk mencapai ketiga tujuan tersebut adalah dengan membuat berbagai kebijakan berupa kebijakan moneter (*monetary policy*) dan kebijakan fiskal (*fiscal policy*).

Menurut Abimanyu (2005), kebijakan fiskal dimaksudkan untuk mendorong perekonomian yang berdampak pada peningkatan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, peningkatan pendapatan nasional bersumber dari kenaikan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor dan penurunan impor. Dari sisi penawaran, kenaikan pendapatan nasional bersumber dari penambahan kemampuan produksi karena berkembangnya teknologi dan meningkatnya ketersediaan sumber daya ekonomi.

Kebijakan fiskal pada sektor pertanian yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor pertanian. Menurut Arifin (2004) kebutuhan dukungan pemerintah bukan hanya karena skala usaha petani yang relatif kecil sehingga tidak mudah untuk melakukan investasi dengan skala besar, melainkan juga karena secara geografis aktivitas pertanian tersebar secara luas sehingga biaya infrastruktur per jumlah penduduk menjadi tinggi.

Kebijakan fiskal pada sektor pertanian berupa subsidi, pangan, pupuk, dan benih yang selama ini ditempuh pemerintah telah menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi pemerintah dituntut untuk mengurangi subsidi input seperti subsidi pupuk dan benih secara bertahap sehingga beban APBN dapat dikurangi demi terwujudnya *fiscal sustainability*. Namun, pada sisi lain pengurangan subsidi pupuk dan benih tersebut menyebabkan naiknya harga pupuk dan benih di dalam negeri di samping skim subsidi harga yang selama ini diberikan masih kurang memenuhi rasa keadilan karena belum menunjukkan keberpihakan kepada petani sebagai produsen.

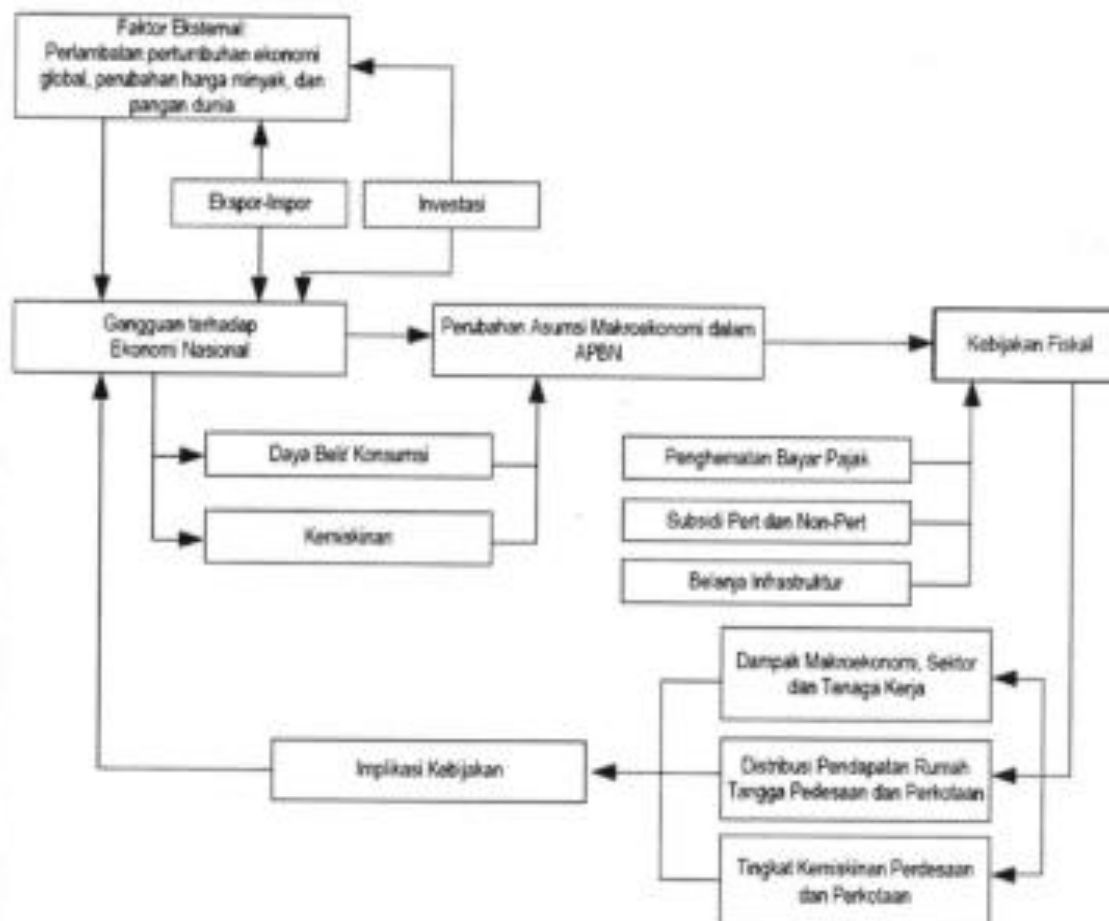
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah upaya merespon berbagai persoalan khususnya mengenai kebijakan subsidi pada sektor pertanian baik berupa subsidi input (pupuk dan benih) maupun subsidi output (pangan) yang dapat mendorong secara optimal pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi pendapatan di perdesaan dan perkotaan. Pada penelitian ini, dibangun suatu kerangka pemikiran yang dituangkan dalam Model *Computable General Equilibrium* (CGE) untuk mengkaji dan memformulasikan dampak kebijakan fiskal pada sektor pertanian terhadap ekonomi, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi dan sektoral dalam sebuah sistem ekonomi nasional pada jangka pendek dan jangka panjang. Secara khusus permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan subsidi input dan output tersebut terhadap (1) pertumbuhan ekonomi (2) penyerapan

tenaga kerja di perdesaan dan perkotaan, dan (3) distribusi pendapatan rumah tangga di perdesaan dan perkotaan.

Tujuan penelitian adalah mengkaji dampak kebijakan subsidi input (pupuk dan benih) dan subsidi output (pangan) terhadap (1) pertumbuhan ekonomi, (2) penyerapan tenaga kerja dipertanian dan perkotaan, dan (3) distribusi pendapatan rumah tangga di perdesaan dan perkotaan.

METODE PENELITIAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi dampak negatif krisis ekonomi global dan nasional, seperti adanya keterlambatan pertumbuhan ekonomi global, perubahan harga minyak dan pangan dunia, serta berbagai gejala ekonomi global lainnya terhadap kinerja perekonomian nasional. Implikasinya mengubah asumsi makroekonomi dalam APBN akibat adanya dayabeli masyarakat dan kemiskinan. Kondisi ini akan menentukan pengambilan keputusan kebijakan fiskal, apakah berasal dari penghematan bayar pajak, subsidi (pertanian dan bukan pertanian), dan belanja pemerintah untuk infrastruktur. Hal tersebut merupakan kerangka pemikiran yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data utama yang digunakan untuk mengkonstruksi data dasar Model CGE adalah Tabel I-O Nasional 2008, SNSE Nasional 2008 dan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2008. Sumber data lain berasal dari berbagai publikasi, yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, BKPM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, dan instansi/lembaga terkait lainnya dengan penelitian.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data menggunakan program GEMPACK Release10, Eviews 7, Stata 11, dan MS Excel. Program tersebut digunakan untuk mengkonstruksi, memodifikasi, mengolah data dasar, membuat pemodelan, dan menghasilkan file solusi, yang diadaptasi dari Model WAYANG (Wittwarr, 2002) yang kemudian dimodifikasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Model CGE.

Struktur dan Sistem Persamaan Model

Model yang digunakan adalah model WAYANG (Wittwarr, 2002). Model tersebut merupakan model yang diadaptasi dari model ORANI-G. Struktur model tersebut dibangun sebagai Model CGE yang sudah disesuaikan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Sistem persamaan yang digunakan dalam model sebanyak 17 blok yang bersifat statik komparatif, kemudian dimodifikasi sesuai tujuan penelitian.

Konstruksi Data Dasar dan Pemodelan

Konstruksi data dasar pemodelan diawali dengan Tabel I-O 2008 yang didisagregasi sesuai dengan tujuan penelitian dari 66 sektor menjadi 69 sektor dengan menggunakan metode *disaggregation matrix*. Terdapat tiga sektor yang didisagregasi, yaitu (1) sektor kacang-kacangan menjadi sektor kedelai dan sektor tanaman kacang-kacangan lainnya, (2) sektor pupuk dan pestisida menjadi sektor pupuk dan sektor pestisida, dan (3) sektor listrik, gas, dan air bersih menjadi sektor listrik dan sektor gas dan air bersih. Kemudian mengagregasikan kembali dari 69 sektor menjadi 40 sektor sesuai tujuan analisis. Nilai elastisitas dan parameter diestimasi dengan memakai data *time series* Indonesia periode 1984-2011, mengadaptasi dari *database* GTAP terbaru, dan mengadopsi hasil penelitian sebelumnya.

Simulasi Kebijakan

Simulasi kebijakan pada penelitian ini adalah (1) simulasi kebijakan subsidi pangan meningkat sebesar 34,01% (SIM1), (2) simulasi kebijakan subsidi pupuk turun sebesar 17,62% (SIM2) dan (3) simulasi kebijakan subsidi benih menurun sebesar 53,73% (SIM3), dan (4) simulasi kebijakan gabungan pada SIM1, SIM2, dan SIM3. Besaran nilai *shock* dalam simulasi diperoleh dari adanya perubahan besaran subsidi pemerintah pada APBN-P 2012 terhadap APBN 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Fiskal pada Sektor
Pertanian terhadap Ekonomi

Dampak kebijakan subsidi pangan terhadap beberapa indikator makroekonomi Indonesia disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel 1 diketahui bahwa kebijakan subsidi pangan (SIM1) berdampak kepada indikator makroekonomi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, pada sisi pengeluaran, PDB riil nasional sebagai proksi pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0,05%. Peningkatan PDB riil tersebut dipengaruhi oleh output agregat (0,12%), volume ekspor (0,14%), dan neraca perdagangan (0,04%). Pada jangka panjang PDB riil meningkat sebesar 0,32%, yang dipengaruhi oleh output agregat (0,38%), investasi riil (0,04%), dan konsumsi riil rumah tangga (2,40%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pangan meningkatkan PDB riil dengan mekanisme transmisi melalui neraca perdagangan dan indeks volume ekspor pada jangka pendek, sedangkan pada jangka panjang dibentuk oleh konsumsi riil rumah tangga dan investasi riil secara agregat.

Tabel 1. Hasil simulasi dampak kebijakan fiskal pada sektor pertanian terhadap beberapa variabel makroekonomi (%)

Deskripsi	SIM1		SIM2		SIM3		SIM4	
	SR	LR	SR	LR	SR	LR	SR	LR
Neraca perdagangan (deB)	0,04	-1,05	0,02	-0,01	0,06	-2,20	0,12	-4,24
Indeks deplator PDB (p0gdpexp)	-0,92	1,09	-0,14	-0,29	-1,31	3,15	-2,37	6,90
Upah nominal rata-rata (p1lab_io)	0,00	1,59	0,00	-1,42	0,00	5,31	0,00	1204
Indeks harga investasi (p2tot_i)	-0,01	1,10	0,03	-0,03	0,01	2,58	0,03	5,22
Indeks harga konsumen (p3tot)	-1,41	0,77	-0,24	-0,36	-2,13	2,47	-3,78	5,80
Indeks harga ekspor (p4tot)	-0,09	0,89	-0,02	-0,09	-0,22	1,95	-0,33	4,03
Indek volume impor (x0cif_c)	-0,03	1,79	0,22	0,48	-0,06	3,68	0,13	7,60
Output agregat (x1prim_i)	0,12	0,38	0,12	0,41	0,17	0,44	0,40	0,65
PDB riil sisi pengeluaran (x0gdpexp)	0,05	0,32	0,02	0,29	0,11	0,32	0,18	0,13
Investasi riil agregat (x2tot_i)	0,00	0,04	0,00	0,46	0,00	-0,34	0,00	-1,01
Konsumsi rumah tangga riil (x3tot)	0,00	2,40	0,00	0,22	0,00	4,74	0,00	8,72
Indek volume ekspor (x4tot)	0,14	-2,90	0,30	0,49	0,32	-6,28	0,76	-1215

Keterangan: SIM1 = simulasi kebijakan subsidi pangan naik sebesar 34,01%; SIM2 = simulasi kebijakan subsidi pupuk naik sebesar 17,62%; SIM3 = simulasi kebijakan subsidi benih turun sebesar 53,73%; SIM4 = simulasi secara serentak antara SIM1, SIM2, dan SIM3; SR = jangka pendek (short-run); LR = jangka panjang (long-run)

Selanjutnya, simulasi kebijakan subsidi pupuk (SIM2) berdampak terhadap kinerja makroekonomi, pada jangka pendek meningkatkan PDB riil sebesar 0,02%, sedangkan pada jangka panjang sebesar 0,29%. Peningkatan PDB riil tersebut, pada jangka pendek, disebabkan oleh volume ekspor yang meningkat 0,03% dan output agregat yang naik 0,12%, sedangkan pada jangka panjang peningkatan PDB riil tersebut disebabkan oleh investasi riil yang naik (0,46%), konsumsi rumah tangga yang naik (0,22%), meningkatnya indeks volume ekspor (0,30%) dan output agregat yang naik (0,41%). Hal ini memberikan penjelasan bahwa penerapan kebijakan subsidi pupuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebagai akibat kenaikan output agregat, penurunan indeks harga konsumen turun, kenaikan investasi riil agregat, dan konsumsi rumah tangga dan indeks volume ekspor.

Simulasi berikutnya, SIM3, yaitu kebijakan subsidi benih yang menurun berdampak meningkatkan GDP riil sebesar 0,11%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan indeks volume ekspor (0,32%) dan neraca perdagangan (0,06%) pada jangka pendek. Untuk jangka panjang, berdampak pada meningkatkan GDP riil sebesar 0,32% dan kenaikan konsumsi riil rumah tangga sebesar 4,74%. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan subsidi pupuk berdampak terhadap output agregat, volume ekspor naik yang mendorong perdagangan meningkat sehingga GDP riil juga meningkat.

Simulasi gabungan (SIM4) memperlihatkan baik jangka pendek maupun jangka panjang mampu meningkatkan GDP riil, berurutan sebesar 0,18% dan 0,13%. Kenaikan GDP riil tersebut, pada jangka pendek, terjadi karena naiknya output agregat sebesar 0,40% dan menaikkan volume ekspor 0,78%, sedangkan jangka panjang karena output agregat naik 0,65% dan konsumsi rumah tangga meningkat 8,72%. Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa kebijakan fiskal pada sektor pertanian menyebabkan naiknya output agregat yang mendorong naiknya GDP riil sebagai pertumbuhan ekonomi nasional.

Dampak Kebijakan Fiskal pada Sektor Pertanian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Perdesaan dan Perkotaan

Dampak kebijakan fiskal pada sektor pertanian terhadap jumlah permintaan tenaga kerja di perdesaan disajikan pada Tabel 2. Simulasi pada pengeluaran pemerintah untuk subsidi pangan (SIM1), dalam jangka pendek, jumlah permintaan tenaga kerja perdesaan yang paling tinggi yang tergolong pada sektor pertanian terutama tenaga kerja yang bekerja menghasilkan padi dan beras masing-masing sebesar 17,69% dan 10,11%. Demikian pula terjadi pada jangka panjang, masing-masing sebesar 26,33% dan 12,56%. Temuan ini memberikan penjelasan bahwa subsidi pangan yang bertujuan untuk mensubsidi harga pangan bagi rumah tangga miskin yang didistribusikan oleh Bulog agar mudah diakses. Karena subsidi pangan ini, khususnya beras diberikan untuk subsidi output pada sisi peningkatan konsumsi masyarakat, jumlah tenaga kerja yang diminta pada komoditi terkait langsung komoditas tersebut, yaitu padi dan beras, peningkatan penyerapan tenaga kerja jangka panjang lebih besar daripada jangka pendek sebagai akibat stimulus produksi dan konsumsi yang tinggi.

Hasil simulasi kebijakan subsidi pupuk (SIM2) menunjukkan bahwa jumlah permintaan tenaga kerja di perdesaan yang paling tinggi adalah tenaga kerja di sektor industri yang memiliki keterkaitan (*linkage*) secara langsung dengan pupuk terutama tenaga kerja pada level produsen dan konsumen pupuk, yaitu sebesar 6,46% dalam jangka pendek dan 8,36% dalam jangka panjang. Temuan ini memberikan penjelasan bahwa kebijakan subsidi pupuk ini bertujuan untuk mendukung program revitalisasi pertanian yang disalurkan melalui BUMN produsen pupuk, seperti PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Iskandar Muda. Bantuan langsung pupuk (BLP) disalurkan melalui PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani. Oleh karena itu, kebijakan subsidi pupuk ini, untuk subsidi masyarakat pada sisi produksi masyarakat dianggap sebagai barang antara dan faktor input primer sehingga penyerapan tenaga kerja yang diminta juga terkait langsung dengan komoditas tersebut. Kondisi ini memberikan pemahaman bahwa

peningkatan penyerapan tenaga kerja pada jangka panjang lebih tinggi daripada jangka pendek.

Kebijakan subsidi benih (SIM3) juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di pedesaan, tenaga kerja yang dibutuhkan dalam jangka pendek dan panjang meningkat pada sektor padi, kedelai, dan jagung. Tenaga kerja yang bekerja pada sektor padi, secara berurutan jangka pendek dan panjang, juga meningkat sebesar 19,89% dan 35,39%. Untuk komoditas kedelai sebesar 7,26% dan 11,04%, dan untuk komoditas jagung 19,14% dan 38,81%, serta komoditas beras juga tinggi sebesar 11,30% dan 15,04%.

Tabel 2. Hasil simulasi dampak kebijakan fiskal pada sektor pertanian terhadap jumlah permintaan tenaga kerja pedesaan (%)

Sektor	SIM1		SIM2		SIM3		SIM4	
	SR	LR	SR	LR	SR	LR	SR	LR
Padi	17,69	26,33	-1,12	-0,52	19,89	35,39	36,46	75,50
Kedelai	-0,25	-0,37	0,16	0,93	7,26	11,04	7,17	8,55
Jagung	-0,45	1,88	-0,88	-0,06	19,14	38,81	17,81	37,47
Umbi-umbian kacang	-0,38	0,67	-0,01	0,76	-0,27	0,69	-0,67	0,07
Sayur dan buah	-0,25	0,65	-0,21	0,52	-0,40	0,37	-0,86	-0,38
Tanaman pangan lain	-0,20	-1,00	0,43	1,23	-0,09	-2,89	0,14	-5,95
Perkebunan	-0,46	-3,26	2,42	3,57	-0,68	-7,47	1,28	-13,95
Peternakan	-0,60	1,79	0,00	0,97	-0,20	3,50	-0,80	4,61
Kehutanan	0,20	0,30	0,13	1,31	0,45	-0,58	0,78	-2,28
Perikanan	-0,39	1,78	-0,02	0,77	-0,16	3,25	-0,57	4,89
Minyak dan gas	0,00	-1,59	0,01	0,69	0,00	-4,22	0,02	-8,53
Batubara dan logam	-0,05	-2,68	-0,06	0,76	-0,10	-6,66	-0,22	-13,28
Kilang minyak	-0,25	-2,18	-0,04	0,76	-0,31	-5,37	-0,60	-10,65
Makanan, minuman dan lembakau	-0,61	2,32	0,09	1,01	1,08	5,93	0,56	8,45
Beras	10,11	12,56	1,07	1,81	11,30	15,04	22,47	28,61
Tekstil, pt	-0,06	-4,29	-0,11	1,07	-0,11	-10,37	-0,26	-20,21
Bambu, kayu dan rotan	0,03	-1,58	0,05	0,90	0,15	-4,17	0,23	-8,48
Pulp dan kertas	-0,04	-2,22	0,03	0,86	0,22	-5,34	0,21	-10,96
Pupuk	2,30	2,75	6,46	8,36	3,82	4,18	12,58	12,69
Pestisida	0,38	-0,96	1,03	1,97	0,59	-3,28	2,00	-6,65
Kimia karet	-0,05	-1,55	0,05	0,86	-0,04	-4,25	-0,04	-6,56
Semen	0,04	-0,82	0,05	1,14	0,08	-2,92	0,16	-6,35
Logam besi baja	0,17	-3,20	0,05	0,94	0,42	-7,62	0,64	-14,98
Barang logam	0,01	-1,47	0,03	0,98	0,03	-4,18	0,07	-6,67
Mesin angkutan	-0,09	-1,47	-0,01	0,88	-0,16	-4,16	-0,26	-8,51
Industri lain	-0,04	-1,56	0,01	0,88	-0,01	-4,25	-0,03	-8,76
Listrik	-0,30	-0,01	-0,03	0,83	-0,47	-1,01	-0,80	-2,61
Gasair	-0,30	-0,01	-0,03	0,83	-0,47	-1,01	-0,80	-2,61
Bangunan	0,01	-0,15	0,04	1,12	0,01	-1,40	0,06	-3,46
Perdagangan	-0,15	0,20	0,01	0,79	-0,18	-0,51	-0,33	-1,78
Restoran dan perhotelan	0,44	0,71	0,06	0,73	0,41	0,10	0,91	-0,72
Kereta api	-0,20	0,26	-0,02	0,47	-0,34	-0,06	-0,56	-0,50
Angkutan darat	-0,13	0,23	0,02	0,62	-0,18	-0,25	-0,29	-1,07
Angkutan air	0,14	-1,80	0,05	0,84	0,34	-4,65	0,53	-6,51
Angkutan udara	-0,14	0,17	-0,01	0,68	-0,24	-0,54	-0,39	-1,64
Jasa angkutan	-0,01	-1,20	0,02	0,84	0,06	-3,48	0,07	-7,37
Komunikasi	-0,21	0,09	-0,01	0,84	-0,35	-0,88	-0,56	-2,42
Keuangan	-0,14	-0,04	0,15	1,00	-0,19	-1,11	-0,19	-2,87
Jasa pemerintah	-0,02	2,01	0,00	0,25	-0,03	3,63	-0,04	6,94
Jasa lainnya	-0,31	2,19	-0,04	0,90	-0,70	3,18	-1,05	5,13

Keterangan: rural = pedesaan, urban=perkotaan

Pada SIM4, sebagai simulasi serentak pada ketiga simulasi, dampak yang dirasakan dalam penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek yang besar terkena adalah yang bekerja di sektor padi, kedelai, jagung, beras dan pupuk, masing-masing secara berurutan 36,46%, 7,17%, 17,81%, 22,47%, dan 12,58%. Selanjutnya dalam jangka panjang, nilai perubahan peningkatannya lebih besar

daripada jangka pendek, secara berurutan pada komoditas yang sama adalah 75,50%, 8,55%, 37,47%, 28,61%, dan 12,69%. Dengan demikian, kebijakan subsidi di sektor pertanian yang bertujuan memberikan kemudahan dalam aksesibilitas harga pangan murah dan peningkatan produksi dengan biaya input produksi (pupuk dan benih) yang terjangkau untuk rumah tangga miskin selain mampu meningkatkan produksi, juga mampu mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Kondisi dan penjelasan tersebut di atas terjadi juga pada pola, perubahan, dan perilaku sektoral dalam penyerapan tenaga kerja di perkotaan pada SIM1, SIM2, SIM3, dan SIM4. Hanya saja, perbedaannya adalah besaran perubahan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan yang terjadi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dampak Kebijakan Fiskal pada Sektor Pertanian terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Perdesaan dan Perkotaan

Dampak kebijakan fiskal pada sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan riil rumah tangga di perdesaan dan perkotaan disajikan pada Tabel 3. Kebijakan subsidi pangan sebagai subsidi output (SIM1) berdampak pada kenaikan pendapatan riil rumah tangga jangka panjang lebih besar jika dibandingkan dengan jangka pendek. Pada jangka pendek, peningkatan pendapatan riil rumah tangga pada kisaran 0,16% hingga 0,59%, sedangkan pada jangka panjang pada kisaran 2,34% hingga 3,66%. Kebijakan ini, pada jangka pendek, secara umum peningkatannya terjadi pada rumah tangga di perdesaan, demikian pula terjadi pada jangka panjang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi pangan mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sebagai proksi dalam mengurangi kemiskinan. Instrumen kebijakan subsidi pangan mencapai rumah tangga sasaran kebijakan terutama dalam memberikan harga jual pangan terjangkau bagi rumah tangga sasaran yang berpendapatan rendah. Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat mengurangi rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga aksesibilitas rumah tangga tersebut terhadap pangan menjadi mudah dan terjangkau.

Kebijakan subsidi pupuk (SIM2), dalam jangka panjang mempunyai besaran dampak yang lebih kecil terhadap perubahan pendapatan tingkat rumah tangga jika dibandingkan dengan jangka pendek, bahkan dalam jangka panjang mengalami penurunan baik pada rumah tangga perdesaan maupun perkotaan. Dalam jangka pendek, kebijakan subsidi pupuk berdampak pada besaran peningkatan pendapatan riil antara 0,09% dan 0,13%, sedangkan untuk jangka panjang sebesar antara -0,26% dan 0,14%. Subsidi pupuk bertujuan mendukung program revitalisasi pertanian dalam rangka menjaga dan meningkatkan program ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian (khususnya beras). Kebijakan tersebut disalurkan melalui BUMN produsen pupuk (PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Iskandar Muda), dan bantuan langsung pupuk (BLP) yang disalurkan melalui PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani. Pada jangka pendek, kebijakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga di perdesaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan di perkotaan. Sebaliknya, pada jangka panjang tidak memberikan peningkatan pendapatan di semua golongan rumah tangga, sebaliknya terjadi

pada rumah tangga buruh pertanian di perdesaan dan rumah tangga di sektor bukan pertanian di perkotaan yang berpendapatan rendah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penurunan subsidi pupuk terhadap redistribusi pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga baik di perdesaan maupun di perkotaan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak tepat sasaran. Terjadinya penurunan pendapatan kelompok rumah tangga pada jangka panjang mengindikasikan bahwa kebijakan subsidi pupuk tidak dapat memperbaiki redistribusi pendapatan dan mendorong naiknya kesejahteraan rumah tangga, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kondisi ini diduga terjadi karena pelaksanaan distribusi yang hanya pada beberapa rumah tangga yang mampu mengaksesnya (*inequality*), karena selain elastisitas pendapatannya lebih elastis juga besaran pendapatan rumah tangga tersebut tidak mampu mencapai akses pupuk bersubsidi.

Apabila kebijakan subsidi benih disimulasikan (SIM3), sebagai kebijakan subsidi input yang ditujukan untuk peningkatan produksi melalui menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga yang terjangkau bagi petani, sebagai dukungan terhadap program revitalisasi pertanian, ternyata mampu meningkatkan pendapatan rumah tanggadi perdesaan yang lebih besar, pada jangka pendek, dengan kisaran 0,73% hingga 1,09% jika dibandingkan dengan di perkotaan antara 0,31% hingga 1,08%. Pada jangka panjang, dampaknya pada kisaran 5,75% hingga 8,25%. Kondisi tersebut mengindikasikan meskipun subsidi benih menurun, tetap mampu meningkatkan pendapatan riil rumah tangga baik di perdesaan maupun di perkotaan. Artinya, subsidi benih memberikan perbaikan distribusi pendapatan rumah tangga, yaitu dengan meningkatnya pendapatan riil rumah tangga.

Tabel 3. Hasil simulasi dampak kebijakan fiskal pada sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan riil rumah tangga di perdesaan dan perkotaan(%)

Rumah tangga	SIM1		SIM2		SIM3		SIM4	
	SR	LR	SR	LR	SR	LR	SR	LR
rural1	0,59	3,55	0,12	0,14	1,09	7,81	1,80	15,87
rural2	0,53	3,58	0,12	-0,03	0,97	8,07	1,62	16,46
rural3	0,46	3,49	0,13	-0,17	0,83	8,03	1,41	16,37
rural4	0,41	3,39	0,13	-0,26	0,73	7,92	1,26	16,17
rural5	0,57	3,51	0,11	-0,03	1,04	7,90	1,71	16,17
rural6	0,58	3,66	0,12	-0,02	1,06	8,25	1,76	16,81
rural7	0,34	3,04	0,11	-0,32	0,62	7,18	1,07	14,74
urban1	0,59	3,50	0,12	0,09	1,08	7,74	1,78	15,77
urban2	0,38	3,03	0,10	-0,22	0,70	7,07	1,18	14,53
urban3	0,16	2,34	0,09	-0,43	0,31	5,75	0,56	11,96

Keterangan: rural1= RT buruh pertanian di perdesaan; rural2= RT petani pemilik lahan < 0,5 hektar; rural3= RT petani pemilik lahan antara 0,5-1,0 hektar; rural4= RT petani pemilik lahan > 1,0 hektar; rural5= RT bukan pertanian golongan rendah di perdesaan; rural6= bukan angkatan kerja di perdesaan; rural7= RT bukan pertanian golongan atas di perdesaan; urban1= RT bukan pertanian golongan rendah di perkotaan; urban2= RT bukan angkatan kerja di perkotaan; urban3= RT bukan pertanian golongan atas di perkotaan.

Selanjutnya, apabila ketiga simulasi dilakukan secara bersama-sama (SIM4), dampak pada jangka pendek dan jangka panjang mampu meningkatkan pendapatan riil rumah tangga, berturut-turut pada kisaran 0,56% hingga 1,80%, dan kisaran 11,96% hingga 16,81%. Dampak peningkatan pendapatan pada rumah tangga di perdesaan lebih besar jika dibandingkan dengan pada rumah tangga di perkotaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini berarti bahwa kebijakan fiskal pada sektor pertanian memberikan dampak terhadap

peningkatan pendapatan riil rumah tangga di perdesaan dan perkotaan dengan dampak peningkatan di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kebijakan fiskal pada sektor pertanian, yang berupa subsidi pangan, pupuk, dan benih, terhadap makroekonomi berdampak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada jangka pendek, dampak peningkatan tersebut selain disebabkan oleh faktor naiknya output agregat juga semakin meningkatnya volume ekspor dan neraca perdagangan, sedangkan pada jangka panjang, selain oleh naiknya output agregat yang diiringi investasi riil meningkat, juga oleh kenaikan upah nominal rata-rata tenaga kerja dan tingkat konsumsi rumah tangga.

Dampak kebijakan fiskal pada sektor pertanian yang bertujuan memberikan kemudahan dalam aksesibilitas harga pangan murah bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan target peningkatan produksi dengan biaya input produksi (pupuk dan benih) yang terjangkau petani terhadap penyerapan tenaga kerja baik di perdesaan maupun diperkotaan ternyata mampu meningkatkan pada berbagai sektor. Kemampuan untuk mendorong naiknya jumlah tenaga kerja yang diserap tersebut, sektor tersebut secara langsung sangat terkait dengan kebijakan tersebut. Kenaikan penyerapan tenaga kerja di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kebijakan fiskal pada sektor pertanian juga memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan riil rumah tangga di perdesaan dan perkotaan, dengan dampak peningkatan di perdesaan lebih besar jika dibandingkan dengan di perkotaan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan dan penjelasan ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga khususnya rumah tangga berpendapatan rendah dan mendorong mengurangi kemiskinan, terutama di perdesaan sebagai lokasi/kantung orang miskin yang paling potensial.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, rekomendasinya adalah perlu mempertahankan kebijakan fiskal pada sektor pertanian, baik subsidi input maupun subsidi output. Hanya saja, perlu meningkatkan besaran nilai subsidi, memperbaiki manajemen dan sistem distribusi, memperbaiki prasarana penunjang kebijakan, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain mempertahankan kebijakan tersebut, perlu dicapai sebuah pertumbuhan ekonomi makro yang terukur, tertarget, dan terencana sebagai stimulasi dalam pencapaian sasaran yang tepat. Pada Jangka pendek dan panjang, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan tersebut dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja, perlu memperbaiki pasar tenaga kerja baik di perdesaan dan di perkotaan. Upaya mengurangi ketimpangan dan meningkatkan distribusi pendapatan rumah tangga sebagai proksi kesejahteraan baik di perdesaan

maupun perkotaan, perlu dilakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi tertarget melalui kombinasi dengan berbagai kebijakan fiskal yang lain baik di sektor pertanian maupun di sektor bukan pertanian, seperti subsidi kredit untuk petani, subsidi pajak, dan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu A. 2005. Kebijakan fiskal dan efektivitas stimulus fiskal di Indonesia: Aplikasi Model Makro-Modfi dan CGE Indorani. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 1:1-35.
- Arifin. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wittwarr G. 2002. *WAYANG: A General Equilibrium Model Adapted for the Indonesian Economy*. Centre for International Economic Studies. School of Economics, The University of Adelaide.